

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA

Misbahul Anam

(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Jember)

e-mail : misbahula224@gmail.com

Yanny Tuharyati, S.H., M.H

(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Jember)

ABSTRAK

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi, baik oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia. Masalah sampah merupakan masalah yang umum yang telah menjadi fenomena universal diberbagai negara belahan dunia manapun, dengan titik perbedaannya terletak pada seberapa banyak sampah yang dihasilkan. Bagi setiap kota besar, termasuk setiap daerah, masalah sampah merupakan salah satu aspek yang cukup rumit. Penanganan sampah di perkotaan maupun didaerah pusat aktivitas masyarakat menjadi masalah yang cukup serius. dirasakan mengingat berbagai pihak, sehingga telah menempatkan berbagai isu pertama bagi pemerintah daerah diseluruh indonesia¹, sehingga hal ini di indikasikan dengan berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pertumbuhan sampah terjadi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus secara alami. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbunan sampah di kota banyuwangi mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kata Kunci : Hukum Lingkungan, Sampah, Desa

¹ Sudradjat, tth, *Mengelola sampah kota*. Seri Agritekno. PS, hlm. 6